

MOTIF PEMERINTAH AUSTRALIA MELALUI PROGRAM HCPI TERHADAP KAUM GAY DAN WARIA DI BALI TAHUN 2009

I Gede Fredy Widamahanata¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: fredywmers@gmail.com¹⁾, idinfasisaka@gmail.com²⁾, tih_ratihkumaladw@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

Since the beginning of the 21st century, the issue of foreign aid is become interesting to be studied in the context of international development. Along the development era of foreign aid is now not only limited through military aspects but also to follow the changes and complex global problems. Since the 1990s, Indonesia is a country with people living with HIV / AIDS which is quite high. This is a concern for the government of Australia until the assistance program called the Indonesia HIV / AIDS Prevention and Care Project (IHPCP) which appeared in 1995 and ended in 2008. The program, hereinafter referred to HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI), which focus on deployment HIV / AIDS in Bali against gays and transvestites. Gaya Dewata Foundation is their counterparts in realizing some of Australia's aid program in tackling the risk of spreading contagious infection of HIV / AIDS for gay and transgender group in Bali. On the other hand, the condition of the transmission of HIV / AIDS on homosexuals in Australia increased in 2008 and 2012 reached 67%. This study examined using the theory of motive foreign aid with scope of problem that focuses only on the motives of the Australian government in providing assistance to Indonesia to deal with cases of HIV / AIDS, especially on gays and transvestites in Bali. Results and how Australia with Indonesia an agreement in the fight against HIV / AIDS is not the orientation in this study because in this phenomenon is only focused on the motives of the Australian government aid.

Key Words: *Foreign aid, HIV / AIDS, HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI), the Australian government, the motives of foreign aid*

1. PENDAHULUAN

Sejak awal abad 21, isu pemberian bantuan luar negeri semakin menarik untuk dikaji dalam konteks pembangunan internasional. Seiring berubahnya isu yang semakin beragam dan kompleks bantuan luar negeri juga mengalami perubahan, tidak hanya sebatas bantuan militer dan politik. Perubahan bentuk bantuan luar negeri bisa didasarkan atas national interest suatu negara pendonor yang dipengaruhi oleh kebutuhan dari negara resipien. Menurut David Sogge pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri tidak terlepas dari motif oleh para pemberi bantuan atau Negara donor. Segala bentuk bantuan tidak terlepas dari motif yang melatarbelakangi munculnya bantuan luar negeri tersebut.

Salah satu permasalahan global dewasa ini adalah pada penyebaran virus HIV/AIDS. Penyebaran virus ini sudah memasuki angka yang sangat meresahkan masyarakat global. Menurut data dari Global Health Observatory (GHO) sejak ditemukannya virus ini kurang lebih pada

tahun 1980an, hampir 78 juta manusia telah terinfeksi dan 39 juta jiwa harus meninggal karena HIV/AIDS di dunia. Data yang sama juga mengatakan bahwa pada akhir tahun 2013, secara keseluruhan dalam tingkat internasional 35 juta jiwa terinfeksi penyakit tersebut. Diperkirakan bahwa, 0,8% dari orang dewasa berusia 15 - 49 tahun di seluruh dunia hidup dengan HIV (Global Health Observatory (GHO) data, 2013).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita HIV/AIDS yang cukup besar sejak 1990an. Oleh karena itu menurut perusahaan pengembangan manajemen internasional yakni GRM International, pemerintah Australia sudah menaruh perhatian terhadap penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia sejak tahun 1995. Perhatian tersebut direalisasikan dengan program yang disebut dengan Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (IHPCP). Program IHPCP tersebut telah berjalan dalam dua fase, fase pertama berakhir pada tahun 2007 dan fase kedua berakhir pada Februari 2008.

AIPH adalah segala aktivitas baik dari Australia maupun Indonesia yang terbingkai ke dalam sebuah kerjasama guna mencegah penyebaran virus HIV/AIDS. Kerjasama ini kemudian melahirkan program yang bernama HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI). Data dari Ditjen PP & PL, Kemenkes RI pada tahun 2006 berdasarkan laporan provinsi melaporkan bahwa Bali adalah provinsi dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi ke-5 di Indonesia (Ditjen PP & PL Depkes RI, 2009). Dinas Kesehatan Provinsi Bali penyebaran virus melalui seks sesama jenis terus mengalami peningkatan sejak tahun 1987 sampai 2007. Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) tidak membatasi diri dengan kaum hekeroseksual saja namun mereka juga menerapkan program HCPI dengan Yayasan Gaya Dewata (YGD) sejak tahun 2009.

Jika melihat kondisi di Australia, penularan HIV terus terjadi terutama melalui kontak seksual antara laki – laki. Pada tahun 2008 hingga 2012, tingkat penderita kasus HIV/AIDS pada kaum homoseksual mencapai 67%. Hal tersebut menyebabkan kaum gay dan waria menjadi fokus perhatian dari pemerintah Australia karena tingkat penderita HIV/AIDS dari homoseksual yang jauh lebih tinggi dari hekeroseksual yang hanya mencapai 25% dari populasi masyarakat di Australia. (Australian Federation of AIDS Organisations about HIV and Stigma in Australia a Guide for Religious Leaders, 2014, p. 8). Pada dasarnya banyak negara maju dan organisasi internasional yang memberikan bantuan kesehatan terhadap Indonesia khususnya di bidang penyebaran virus HIV/AIDS. Namun disayangkan dari sekian banyak bantuan luar negeri dalam pemberantasan HIV/AIDS di Indonesia mereka hanya memfokuskan pada kaum hekeroseksual saja. Kaum homoseksual dianggap kurang memiliki dampak terhadap penyebaran virus mematikan ini. Sehingga keberadaan mereka dikesampingkan maka disinilah Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) melakukan perannya melalui program HCPI.

Yayasan Gaya Dewata (YGD) Bali merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menaungi komunitas homoseksual diantaranya terdiri dari kaum gay dan waria. Yayasan ini bergerak dibidang kesehatan dimana program-program yang mereka lakukan menghusus

pada penanggulangan resiko penyebaran infeksi menular dari HIV/AIDS untuk kelompok gay dan waria di Bali. Melihat bahwa program HCPI tidak memandang sebelah mata kaum homoseksual hingga mereka memutuskan untuk merangkul komunitas gay dan waria, dimana langkah ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Negara lain dalam proses bantuan luar negeri. Sehingga ini menjadi bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pertama yang digunakan diambil dari jurnal karya Avitia Rahayu N, "Analisa Motif politik, Ekonomi, dan Kemanusiaan Australia terhadap Indonesia Pasca Tsunami melalui Bantuan AIPRD (Australia Partnership for Reconstruction) Tahun 2005-2010" memiliki pembahasan teori yang sama seperti yang digunakan oleh penulis. Tulisannya tersebut memaparkan mengenai bagaimana hubungan Australia dengan Indonesia pada sektor rekonstruksi dan pembangunan yang disebut dengan Australia Partnership for Reconstruction (AIPRD).

Australia merupakan negara sebagai mitra kerjasama pembangunan ODA terbesar bagi Indonesia. Puncaknya adalah pada bencana tsunami di Aceh dan disusul dengan tsunami di Pulau Nias. Disinilah Australia melalui AIPH menjadi salah satu negara pertama yang memiliki inisiatif cepat untuk mengirimkan bantuan sebesar \$1 miliar bagi Indonesia pada 5 Januari 2005. Dengan menekankan pada pembangunan ekonomi dan sosial AIPH memprioritaskan untuk meningkatkan sistem kesiapan dan tanggap darurat di Indonesia. Sehingga program tersebut sebagai dukungan terhadap Indonesia untuk upaya rekonstruksi dan rehabilitas yang dialami oleh Aceh dan Pulau Nias pasca bencana tsunami.

Berdasarkan fenomena tersebut Avitia menganalisis motif Australia terhadap bantuan yang diberikan terhadap Indonesia. Terdapat tiga motif di dalam bantuan tersebut yakni motif politik, ekonomi dan kemanusiaan. Hasil dari analisisnya ia menemukan bahwa jika dilihat dari motif politik ada tiga variabel.

Hal inilah yang memiliki keterkaitan yang sama dengan penelitian penulis dimana Avitia menggunakan teori motif

bantuan luar negeri David Sogge dalam tulisannya. Terdapat sub bab tersendiri mengenai mixed motive yang secara khusus mengelaborasi antara motif bantuan dengan kepentingan negara pendonor dan konsep pembuatan kebijakan. Sehingga memiliki kontribusi yang baik bagi penulis untuk mendapatkan referensi dalam membuat proposal penelitian, tulisan dari Avitia juga memberikan gambaran mengenai kajian lebih dalam terkait hubungan Australia dengan Indonesia.

Kajian pustaka kedua dalam penelitian ini diambil dari Aji Yanuarrahma dengan tulisannya yang berjudul "Peran Australia Agency for International Development (AUSAID) dalam Menangani HIV/AIDS di Papua" tahun 2014. Pada tulisannya ini ia menjelaskan bagaimana hubungan kerjasama antara Australia dengan Indonesia melalui bantuan di bidang kesehatan khususnya dalam penanganan kasus HIV/AIDS di Papua.

Tulisannya tersebut menekankan pada program bantuan pembangunan luar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Hasil dari penelitian Aji Yanuarrahma jika dilihat dari konsep bantuan luar negeri yang ia gunakan bahwa bantuan luar negeri Australia merupakan salah satu strategi politik mereka dalam melakukan suatu hubungan luar negeri. Khususnya hubungan ekonomi, kebijakan bantuan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang di tingkat nasional dan Internasional. Namun Semuanya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut. Demikian pula dengan kebijakan Australia dalam membantu Indonesia.

Tulisan ini dapat memberikan gambaran bagi penulis untuk memahami beberapa bentuk bantuan Australia di Indonesia dan bagaimana menganalisa motif bantuan tersebut. Dengan demikian meskipun program bantuan yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini berbeda dari segiobjek penelitiannya namun berkontribusi sebagai referensi atau pengetahuan baru mengenai bantuan luar negeri Australia di Indonesia khususnya dibidang kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS. PBB memiliki aturan hukum yang mengikat (legal binding).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Teori Motif Bantuan Luar Negeri

Menurut Bayu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005 dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyebutkan bahwa bantuan luar negeri merupakan salah satu alat dari kebijakan luar negeri guna mencapai kepentingan nasional suatu Negara. Beberapa ahli ilmu hubungan internasional memiliki definisi tersendiri dalam mengartikan bantuan luar negeri. Salah satunya adalah definisi bantuan luar negeri menurut K.J. Holsti, dalam bukunya yang berjudul *International Politics : Framework of Analysis*, Ia menjelaskan bahwa bantuan luar negeri adalah sebuah kegiatan penyerahan dana, teknologi, ataupun bantuan-bantuan teknis dari Negara yang memberikan bantuan terhadap Negara penerima (K.J. Holsti, *International Politics : Framework of Analysis*. Prentice Hall: New Jersey, 1995, p. 182).

Salah satu penjelasan yang menarik mengenai bantuan luar negeri dikemukakan oleh David Sogge dalam buku (*Give and Take: What's the Matter with Foreign Aid?* London: Zed books 2002, p. 65) dimana Ia mengatakan bahwa: *"Aid chains are systems of power. They consist of lines of command from the top. They afford a lot of control but they are not almighty. For funny things can happen to policies as they travel down aid chains."* Pernyataan dari Sogge tersebut menekankan bahwa bantuan luar negeri merupakan bagian dari sistem kekuasaan. Adanya indikasi yang terdapat dari bantuan luar negeri adalah sebuah kepentingan dari Negara pendonor yang dibentuk melalui sederet kebijakan dari pejabat Negara. Sehingga para Negara pendonor dapat memegang kontrol kekuasaan melalui bantuan luar negeri yang mereka berikan, hal ini tentunya akan sangat mendukung motif di balik bantuan tersebut.

Bantuan luar negeri juga memiliki pengaruh terhadap jenis motif yang dibawa oleh Negara pendonor. K.J Holsti membedakan jenis bantuan luar negeri dalam beberapa tipe (K.J. Holsti, *International Politics : Framework of Analysis*. Prentice Hall: New Jersey, 1995. 323), yakni: Bantuan Teknis (technical assistance), Hibah (Grant), Pinjaman pembangunan, Bantuan Militer. David

Sogge mengemukakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri tidak terlepas dari motif oleh para pemberi bantuan atau Negara donor. Banyak hal yang melatarbelakangi munculnya bantuan luar negeri tersebut, sehingga untuk dapat mengetahui secara spesifik apa motif dibalik bantuan luar negeri maka dilakukanlah pengklasifikasian untuk menginvestigasi kepentingan pendonor terhadap penerima yang disebut dengan aid allocation motive. Menurut, David Sogge terdapat 3 motivasi negara donor (Give and Take: What's the Matter with Foreign Aid? London: Zed books 2002, p 43), yakni : Motif Politik, ekonomi dan kemanusiaan. Teori motif bantuan luar negeri digunakan oleh peneliti untuk mengklasifikasi motif bantuan yang dilakukan oleh Australia dengan Yayasan Gaya Dewata melalui program HCPI terhadap kaum gay dan waria di Bali. Secara spesifik peneliti menggolongkan fenomena ini ke dalam bantuan luar negeri yang bersifat teknis dan hibah. Peneliti mengkategorikan bantuan Australia ini kedalam tiga bentuk motif yaitu motif politik, kemanusiaan dan ekonomi. Motif - motif tersebut digunakan oleh penulis untuk melihat bentuk motif bantuan Australia secara spesifik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki komponen mendeskripsi, menganalisis dan menafsirkan dalam istilah yang jelas dan tepat (Sulistyo-Basuki, 2006, p. 110). Metode ini dipilih karena penulis lebih memfokuskan pada permukaan data. Metode penelitian ini memperhatikan pada tahap-tahap sehingga terjadinya suatu fenomena dengan sudut pandang induktif. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan mengenai motif-motif pemerintah Australia melalui program HIV Cooperation Programme for Indonesia(HCPI)dengan Yayasan Gaya Dewata terhadap kaum gay dan waria di Bali tahun 2009. Melihat keterbatasan dan keadaan penulis untuk melakukan penelitian secara langsung atau turun lapangan ke Australia sehingga metode penelitian kualitatif deskriptif yang penulis gunakan sebagai metode penulisan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek

Penelitian

4.1.1 Kronologis dan Tingginya Tingkat Penyebaran Virus HIV/AIDS pada Pasangan Sesama Jenis (Gay dan Waria)

HIV/AIDS tidak sepenuhnya diakibatkan oleh faktor hubungan seksual dari kalangan heteroseksual akan tetapi kaum homoseksual juga memiliki resiko yang tinggi terhadap penyebaran virus ini. Awal mula homoseksual menjadi pandemi pada penyebaran virus HIV/AIDS ditemukan pada kelompok gay di Amerika Serikat. Badan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Amerika (Centers for Disease Control and Prevention) pada awal tahun 1980-an melakukan identifikasi mengenai penyakit ini apakah ditularkan melalui hubungan seksual, terutama mereka menginvestigasi kalangan homoseksual berkulit hitam. Satu hal yang menarik pada investigasi ini adalah ketika para peneliti menemukan satu nama yang sering muncul dikalangan kaum gay sebagai pasangan mereka (Sehatmagz.com, 2015).

Nama tersebut adalah Gaetan Dugas seorang pria yang berprofesi sebagai pramugara di maskapai Air Canada dan diduga berperan besar dalam penularan penyakit ini. Ia mengakui dirinya telah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan 250 orang yang berbeda dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 1984 muncul istilah "Patient Zero" untuk menyamakan identitas dari Gaetan Dugas. Istilah tersebut muncul setelah diterbitkannya salah satu halaman pada American Journal of Medicine bahwa penyebaran virus HIV di New York berkaitan dengan "seorang pramugara gay tanpa nama" (Soc.ucsb.edu, 2015). Patient zero atau orang yang menjadi sumber virus memberikan efek yang berbeda-beda terhadap korbannya. Sehingga munculnya efek penyebaran penyakit terhadap korban dengan diagnosis yang berbeda. Penyebaran virus HIV/AIDS akan lebih cepat menyebar jika seseorang melakukan hubungan seksual dengan berpindah-pindah tempat seperti contoh skema diatas yang berlokasi di daerah kota-kota besar Amerika pada tahun 1980.

Data dari UNAID mengatakan bahwa 15% pria gay dan biseksual di Amerika Utara telah positif mengidap HIV/AIDS.

Selanjutnya negara Karibia adalah negara dengan persentasi tertinggi, yakni hampir 25% pria gay dan biseksual telah mengidap HIV/AIDS. (The GAP Report UNAIDS, 2014, p. 203) pemerintah dari negara-negara yang memiliki tingkat penyebaran virus HIV/AIDS tinggi juga mulai menyadari adanya resiko penyebaran virus dari kaum homoseksual berdasarkan penelitian dan data konkrit yang telah di dapat. Contohnya adalah kondisi HIV/AIDS di Australia pada tahun 2008 sampai 2012 menurut Australian Federation of AIDS Organisations about HIV and Stigma in Australia a Guide for Religious Leaders menyebutkan bahwa angka penderita HIV/AIDS pada kaum homoseksual mencapai 67%. Angka ini mengalahkan penyebaran virus melalui kaum hekeroseksual yang hanya mencapai 25% serta 2% angka penggunaan jarum suntik di Australia.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Melissa Bull, Susan Pinto and Paul Wilson yang berjudul Homosexual Law Reform in Australia perihal yang menjadi standing point atau basis Australia mengenai homoseksual ada pada data National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research yang menyebutkan tentang terdapatnya lebih dari 80% warga Australia yang meninggal akibat HIV/AIDS dari hubungan homoseksual atau biseksual pria pada Februari 1990. Perhatian ini kemudian semakin berkembang hingga pemerintahan Australia membuat program salah satunya adalah HCPI (Australian Federation of AIDS Organisations about HIV and Stigma in Australia a Guide for Religious Leaders, 2014, p. 8 & 9).

4.1.2 Program HCPI

Bentuk perhatian pemerintah Australia untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit menular seksual HIV/AIDS terealisasikan dengan dibuatnya sebuah program yang bernama HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI). Pelaksanaan program HCPI juga didasarkan atas perhatian terhadap banyaknya wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali – Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Bali membuktikan bahwa wisawatawan Australia yang berkunjung ke Bali selalu mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2009 sampai 2014. Menurut penelitian dari LaTrobe University Australia, jumlah terbesar kaum

homoseksual di Indonesia terletak di provinsi Bali dengan minimnya pengetahuan mereka mengenai HIV/AIDS. Sehingga dikhawatirkan kaum homoseksual yang rentan terkenal virus tersebut justru semakin bertambah baik itu di Australia maupun Bali.

HCPI merupakan sebuah program yang dibentuk dibawah Australia Indonesia Partnership for HIV (AIPH) dimana dirancang untuk memperkuat respon masyarakat terhadap HIV/AIDS di Indonesia. HCPI terdiri dari lima program utama dan dilaksanakan melalui bantuan hibah yang di peruntukan kepada organisasi pemerintah dan non - pemerintah. Program yang mereka lakukan cenderung mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Adapun komponen program mereka sebagai berikut:

1. Leadership
2. Papua and West Papua
3. Injecting Drug Users
4. Prisons
5. Management

Kelima komponen program diatas pada dasarnya menekankan bahwa penggunaan kondom sangat diwajibkan kepada pasangan yang melakukan hubungan anal seks seperti gay dan transgender. Hal ini dikarenakan hampir 89% dari peserta tes MSM telah terjangkit HIV positif. Bali merupakan salah satu komponen pada program ini yang dianggap sebagai populasi paling berisiko terhadap dampak penyebaran virus HIV/AIDS. Untuk lebih menyukseskan program ini secara merata pemerintah Australia melakukan kerjasama dengan Yayasan Gaya Dewata (HIV Cooperation Program Indonesia: Overview 2016, p. 3 & 4).

4.1.3 Yayasan Gaya Dewata

Yayasan Gaya Dewata merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berperan dalam bidang kesehatan. Sebagai organisasi dengan latar belakang anggota yang sebagian besar terdiri dari gay dan waria, mereka memiliki program khusus terhadap penanggulangan resiko penularan penyakit. Program tersebut seperti pencegahan penyakit menular pada alat reproduksi, HIV/AIDS yang diderita oleh kaum gay dan waria. Ada empat kegiatan utama yang mereka lakukan untuk memberikan edukasi maupun dukungan untuk menekan laju HIV/AIDS di kaum gay dan waria sebagai berikut:

1. Condom Man

2. Program Penjangkauan
3. Konseling
4. Hidup Positif

Walaupun awalnya komunitas ini kurang mendapat posisi yang layak di mata masyarakat Bali akan tetapi, mereka telah membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan untuk meresahkan masyarakat. Hal hasil bukan masyarakat saja yang telah menerima keberadaan mereka, bahkan setiap ada kegiatan dari pemerintahan yayasan ini juga diminta untuk ikut ambil bagian dalam membantu jalannya acara yang sifatnya resmi.

4.2 Motif Pemerintah Australia melalui Program Bantuan HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI) terhadap Kaum Gay dan Waria di Bali Tahun 2009

Hubungan internasional tidak hanya sebatas kerjasama antar beberapa negara ada pula yang disebut dengan kerjasama bilateral. Masalah global yang semakin kompleks mengarahkan hubungan negara yang semakin spesifik. Hubungan bilateral antar dua negara umumnya dapat terjalin dikarenakan adanya kepentingan – kepentingan nasional yang saling berkaitan diantara dua negara tersebut. Kerjasama bilateral merupakan salah satu manifestasi dari politik luar negeri yang dijalankan oleh negara di dalam hubungan internasional.

Salah satu hubungan bilateral adalah antara pemerintah Australia dengan Indonesia. Hubungan diantara kedua belah pihak tersebut telah berlangsung sejak tahun 1950. Posisi negara yang strategis karena letak geografisnya berdekatan merupakan hal yang mempengaruhi hubungan mereka. Walaupun Australia merupakan ‘Negara Barat’ akan tetapi melihat demografi negaranya yang dikelilingi oleh negara - negara berkembang. Upaya pemerintah Australia dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dilakukan dengan cara fokus pada konsolidasi, terutama Indonesia sebagai negara tetangga yang potensial. Untuk mempererat hubungan kedua belah pihak negara, pemerintah Australia melakukan upayanya dengan memberikan bantuan luar negeri ke Indonesia. Program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di

negara - negara berkembang dan dikelola oleh AusAID (AusAID Annual Report, 2006-2007; p.6).

Program bantuan Australia yang ditujukan untuk Indonesia merupakan salah satu cara yang bertujuan mendukung kepentingan nasional Australia. Hal ini dilakukan pemerintah Australia untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pembangunan yang berkesinambungan di Indonesia. Bantuan dari AusAID tersebut merupakan program antar pemerintah Australia dengan Indonesia. Sebagai mitra utama, AusAID memilih Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Berbagai pendekatan dilakukan oleh AusAID dalam program pelaksanaan bantuan luar negeri. Selain memiliki beberapa proyek bilateral AusAID juga menyalurkan dana melalui badan - badan Perserikatan Bangsa - Bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional (INGO). Tidak hanya pada regional nasional, AusAID juga melakukan pendekatan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan berbagai kelompok masyarakat lain. Segala program bantuan dan pendekatan yang dilakukan oleh AusAID tetap harus menempuh persetujuan dari Pemerintah Indonesia (AusAID Annual Report, 2006-2007; p.6).

Sejak 1 Mei 2006, program bantuan luar negeri Australia terhadap Indonesia diganti dengan nama Kemitraan Australia Indonesia atau Australia Indonesia Partnership (AIP). Anggaran yang pemerintah Australia keluarkan untuk seluruh program bantuan ke Indonesia adalah sekitar A\$2 milyar dalam jangka lima tahun. Satu –satunya program bantuan luar negeri dengan anggaran terbesar dalam sejarah pemerintah Australia adalah pada program Australia–Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD) yang bernilai A\$1 milyar. Bantuan tersebut dilaksanakan oleh sejumlah lembaga Pemerintah Australia bermitrakan Pemerintah Indonesia dengan ditetapkannya logo kerjasama AustraliaIndonesia Partnership (AIP) mencerminkan bahwa pentingnya hubungan bilateral kedua belah pihak negara (Australian Government Budget 2005 – 2006).

Pada tahun 2006 sampai 2007, Indonesia merupakan negara dengan penerima bantuan pembangunan terbesar dari Australia. Program tersebut dibagi

menjadi empat komponen utama dalam Australia Indonesia Partnership (AIP) yakni:

1. Memperbaiki Pertumbuhan dan Manajemen Ekonomi
2. Mendukung Transisi ke Era Demokrasi
3. Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Manusia
4. Meningkatkan Akses dan Mutu Jasa Layanan Umum Khususnya di Indonesia Bagian Timur

Perhatian pemerintah Australia terhadap kondisi kesehatan Indonesia khususnya pada penyebaran virus HIV/AIDS direalisasikan dengan program Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (IHPCP). Program bantuan tersebut telah berjalan selama dua fase, pertama berakhir pada tahun 2007 dan fase kedua berakhir pada Februari 2008. IHPCP telah banyak memberikan banyak kontribusi positif terhadap penekanan penyebaran dan meningkatkan respon serta edukasi masyarakat mengenai HIV/AIDS. Setelah program IHPCP berakhir, pemerintah Australia melanjutkan dengan sebuah kerjasama baru yang disebut Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH).

Tujuan dari adanya kerjasama ini adalah untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS, meningkatkan taraf hidup orang dengan HIV/AIDS dan meringankan dampak sosial ekonomi akibat HIV/AIDS di Indonesia. Sehingga program tersebut akan membantu Indonesia untuk mencapai Millennium Development Goal pada sektor kesehatan (Australia – Indonesia Partnership for HIV: 2008 – 2015 Including the HIV Cooperation Program for Indonesia, 2007, p. iv). Cara Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) untuk merealisasikan hal tersebut adalah membuat program baru sebagai reinkarnasi dari IHPCP sebelumnya. Sehingga muncul program baru yang disebut dengan HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI). HCPI adalah program bantuan Australia yang dimulai pada Februari 2008 dengan jangka waktu lima tahun dimana tiga tahun pertama merupakan masa uji coba dan jika mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Indonesia akan dilanjutkan. Adapun komponen program yang telah ditentukan oleh HCPI sebagai berikut:

1. Leadership
2. Papua & West Papua
3. Injecting Drug use
4. Prisons
5. Management

Pada komponen program Injecting Drug Users HCPI memberikan perhatiannya pada provinsi Bali karena menjadi Sub-component: Most-at-risk. Bali merupakan wilayah yang paling beresiko terkena dampak HIV/AIDS melihat bahwa Bali tidak hanya sebagai destinasi pariwisata alam namun juga sebagai pariwisata seksual. Kaum homoseksual menjadi perhatian HCPI karena dianggap rentan dan belum memiliki edukasi yang cukup mengenai HIV/AIDS. Sehingga Yayasan Gaya Dewata dipilih sebagai rekan di regional Bali untuk membantu dan melancarkan program HCPI terhadap kaum gay dan waria (Overview of the HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI) 2016, p. 2).

Menurut seorang ahli, yakni David Sogge, menjelaskan bahwa ada beberapa motif yang mendasari suatu pemberian bantuan luar negeri. Pada penelitian ini memfokuskan dua motif bantuan luar negeri dari sudut pandang Sogge yakni motif politik dan motif kemanusiaan yang sesuai dengan fenomena (Sogge, David. 2002. Give and Take: What's the Matter with Foreign Aid? London: Zed books. hal 65). Pertama adalah motif politik, dimana bertujuan untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan intervensi, cooperation (kerjasama), dan akses. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara pendonor secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan dari negara penerima. Motif politik merupakan salah satu strategi politis dari kepentingan nasional negara pendonor. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa pemerintah Australia sedang melakukan strategi politiknya seperti yang dijelaskan oleh Sogge dengan cara memberikan bantuan HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI) terhadap kaum gay dan waria di Bali tahun 2009 yang semata-mata untuk melindungi warga Australia di Indonesia dan Bali pada khususnya.

Di sisi lain Australia sebagai negara pendonor tidak melihat hal tersebut sebagai beban melainkan sebuah manufer baru yang dapat diterapkan untuk merealisasikan motif politiknya, yakni dengan membuat program serupa yang disebut dengan Sehingga dilanjutkan dengan program serupa yang disebut HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI). Dengan dijalankannya program tersebut pemerintah Australia ingin membuat suatu rasa ketergantungan dari Indonesia atas bantuan Australia sehingga kerjasama bilateral

Australia – Indonesia akan dapat diproyeksikan menjadi lebih progresif. Hal tersebut didukung dengan dokumen dari pemerintah Australia yang berjudul *Independent Evaluation of the Australia Indonesia Partnership for HIV (AIPH) tahun 2011* bahwasanya program AIPH dan HCPI ini memiliki tujuan untuk merancang sebuah kerjasama yang strategis antara pemerintah Australia dengan Indonesia yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS secara nasional (AIPH Management Response, 2011). Selain itu pemerintah Australia menjadi sangat terbantu untuk mengontrol keberadaan wisatawannya yang berada di Indonesia khususnya di Bali agar dapat dilakukan pencegahan maupun penanganan terhadap penyebaran virus HIV/AIDS. Melihat bahwa letak geografis mereka yang berdekatan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia melalui program HCPI tidak hanya dapat merealisasikan motif politik yang dimiliki Australia tetapi juga dapat membentuk suatu citra secara langsung maupun tidak langsung. Pencitraan yang dimaksud adalah Australia akan muncul sebagai negara yang sangat peduli terhadap negara tetangganya di dalam suatu kawasan. Selain itu, ketua yayasan gaya dewata, Christian Supradinata, menyebutkan bahwa yang diberikan oleh Australia melalui HCPI memang bersifat penting karena tanpa adanya bantuan tersebut akan sulit bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk dapat memerangi penyebaran HIV/AIDS di kalangan gay dan waria (wawancara penulis dengan ketua YGD). Pencitraan ini kemudian akan menghasilkan sikap dan rasa percaya dari masyarakat dan pemerintah Indonesia di dalam hubungan bilateral antara Indonesia – Australia.

Selain itu pemberian bantuan luar negeri dalam bentuk program HCPI terhadap kaum gay dan waria di Bali oleh pemerintah Australia memiliki keterkaitan dengan motif kemanusiaan yang disebutkan oleh David Sogge (2002). Terlepas dari motif politik, pemerintah Australia tentunya memiliki motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang melalui kebijakan bantuan luar negeri dengan menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan internasional. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Mubarak seorang narasumber dari kedutaan besar Australia dalam wawancara yang

diadakan oleh stasiun radio Kookaburra tahun 2013 yang menyebutkan bahwa "Diperkirakan sekitar tiga-puluh-tiga juta orang di dunia saat ini hidup dengan HIV/AIDS, lima juta diantaranya berada di Asia dan Pasifik. Australia berketetapan untuk bekerja sama dengan tetangga dekatnya di kawasan, termasuk Indonesia, guna mencapai Millenium Development Goal keenam yaitu untuk memberantas HIV/AIDS dan bekerja sama menciptakan akses universal terhadap pencegahan, dukungan, perawatan dan pengobatan HIV hingga 2010" (Kedutaan Besar Australia - Indonesia, 2009).

Alan Rix mengatakan bahwa pemberian bantuan luar negeri dapat berjalan dengan efektif dalam pembangunan ekonomi yang sejalan dengan penegakan HAM, hukum, serta ketertiban dan keamanan internasional. Meskipun antara motif politik dengan motif kemanusiaan memiliki derajat prioritas yang sama namun menurut Alan Rix suatu negara tentunya akan lebih mengutamakan pertimbangan – pertimbangan yang menjadi dasar daripada motif politik sehingga kerap melampaui urgensi dari motif kemanusiaan secara tidak langsung. (Alan Rix. *Japan's Foreign Aid Challenge Policy Reform and Aid Leadership* (London & New York: Routledge, 1993), dalam Perwita & Yani, pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hlm 84).

Menurut K.J Holsti bantuan luar negeri dapat dibedakan dalam beberapa tipe. Pada penelitian ini mengenai motif pemerintah Australia dikaitkan dengan jenis bantuan teknis dan bantuan hibah (K.J. Holsti, *International Politics : Framework of Analysis*. Prentice Hall: New Jersey, 1995. 323). Bantuan teknis dari pemerintah Australia direalisasikan dengan memberikan tenaga ahli di bidang kesehatan ke Bali. Tenaga kesehatan dari Australia tersebut memberikan edukasi mengenai HIV/AIDS khususnya pada kaum gay dan waria di Bali. Yayasan Gaya Dewata sebagai salah satu wadah komunitas homoseksual di Bali yang dipilih sebagai rekan kerja dari program HCPI. Sehingga para ahli kesehatan dari Australia akan dengan mudah untuk mengakses keberadaan mereka dan memberikan edukasi mengenai seks yang sehat. Sdanya pendampingan dari tenaga kesehatan Australia terhadap Yayasan Gaya Dewata diharapkan dapat memberikan

ilmu pengetahuan yang berkelanjutan terhadap kaum gay dan waria di Bali. Dengan demikian program dampingan ini merupakan persiapan bagi kaum gay dan waria dimasa mendatang untuk mencegah laju penyebaran HIV/AIDS di Bali.

motif pemerintah Australia melalui bantuan hibah, direalisasikan dengan pemberian dana. Bantuan berupa dana tersebut diberikan guna menunjang komunitas gay dan waria di Bali yang diwadahi oleh YGD agar dapat memberikan dan merealisasikan program dari HCPI. Jumlah dana yang diberikan oleh Australia juga bukan dana yang terbilang kecil, dana hibah tersebut dari tahun 2009 sampai 2013 terus mengalami peningkatan bahkan sampai 100% lebih jumlah kenaikan anggaran yang diberikan. Pemberian dana tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah Australia dalam membantu mencengah penyebaran virus HIV/AIDS di Bali pada kaum gay dan waria namun tetap pada koridor motif yang akan mereka upayakan untuk kepentingan nasionalnya. Dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Australia nantinya akan dipergunakan oleh Yayasan Gaya Dewata dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan guna menekan penyebaran virus HIV/AIDS di Bali pada kaum gay dan waria. Sehingga dengan adanya bantuan ini akan memberikan kontribusi yang baik terhadap motif dari kepentingan pemerintah Australia.

Sejak dimulainya bantuan ini pada tahun 2009 dan merekrut Yayasan Gaya Dewata sebagai rekan untuk merealisasikan beberapa programnya banyak pencapaian penting yang mereka dapatkan. Perkembangan setelah program ini dilaksanakan adalah bantuan yang HCPI realisasikan tepat pada sasarannya karena yang mereka rangkul adalah Yayasan Gaya Dewata yang nota bene merupakan wadah atau komunitas gay dan waria di Bali. Sehingga program bantuan yang mereka ingin laksanakan tidak melenceng dari rencana sebelumnya yaitu pada penekanan penyebaran virus HIV/AIDS terhadap gay dan waria. Secara keseluruhan kaum homoseksual di Bali telah memberanikan diri untuk melakukan tes HIV. Hasilnya adalah 89% dari peserta program MSM telah berani untuk melakukan tes HIV dan 70% dari mereka telah menerima hasil termasuk 95% dari transgender. Tidak hanya Bali, kaum homoseksual di Australia juga mengalami kontribusi positif terhadap program bantuan

HCPI. Kaum homoseksual di Australia yang sudah terjangkit HIV positif pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 400 orang menjadi 350 orang pada tahun 2013. Sehingga dapat dikatakan program HCPI ini tidak hanya sukses pada bidang kesehatan di Indonesia namun juga sukses dalam mencapai motif dan tujuan pemerintah Australia untuk tetap melindungi masyarakatnya (HIV, Viral Hepatitis and Sexually Transmissible Infections in Australia 3 Annual Surveillance Report 2014 HIV supplement, p. 10)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa motif pemerintah Australia melalui program HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI) terhadap kaum gay dan waria di Bali tahun 2009 didorong oleh 2 motif yakni motif politik dan motif kemanusiaan. Kerjasama antara Australia dan Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1950 melihat bahwa posisi masing - masing negara yang memiliki letak geografis yang strategis dan berdekatan. Upaya pemerintah Australia untuk mempererat hubungan kedua belah pihak adalah dengan memberikan program bantuan luar negeri ke Indonesia.

Sektor kesehatan selalu menjadi perhatian penting pemerintah Australia terhadap Indonesia dari tahun 1995. Salah satunya dengan adanya program Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (IHPCP) yang berjalan selama 2 fase. Pertama berakhir pada tahun 2007 dan kedua berakhir pada Februari 2008. Setelah program tersebut berakhir pemerintah Australia melanjutkan dengan sebuah kerjasama baru yang disebut Australia–Indonesia Partnership for HIV (AIPH). Kerjasama tersebut melahirkan sebuah program bantuan yang disebut dengan HIV Cooperation Programme for Indonesia (HCPI).

Provinsi Bali menjadi Sub-component: Most-at-risk dimana Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat penyebaran virus HIV/AIDS yang tinggi. Menurut LaTrobe University Australia populasi gay dan waria terbesar di Indonesia terletak di Bali. Kaum homoseksual menjadi perhatian HCPI karena dianggap rentan dan belum memiliki edukasi yang cukup mengenai HIV/AIDS. Sehingga Yayasan Gaya Dewata dipilih sebagai rekan di regional Bali untuk

membantu dan melancarkan program HCPI terhadap kaum gay dan waria.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pemerintah Australia untuk memberikan program tersebut. Bantuan luar negeri Australia terhadap Indonesia tidak terlepas dari motivasi kepentingannya nasional. Pertama terletak pada motif politik, dimana melalui program bantuan ini pemerintah Australia ingin membuat suatu rasa ketergantungan dari Indonesia atas bantuan Australia sehingga kerjasama bilateral Australia – Indonesia akan dapat diproyeksikan menjadi lebih progresif. Selanjutnya Australia bisa mengontrol dan mengintervensi masyarakat dengan membuat program pencegahan HIV/AIDS agar tidak merambat sampai ke Australia.

Motif politik lainnya adalah pencitraan yang akan membuat pemerintah Australia menjadi sebuah figur suatu pemerintahan yang mampu peduli serta menyamaratakan hak dan kewajiban baik kaum homo seksual maupun heteroseksual dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua adalah pada motif kemanusiaan, ada dua alasan pemerintah Australia memberikan perhatiannya melalui program HCPI terhadap kaum gay dan waria di Bali. Pertama karena pada tahun 2009 sampai 2013 persentase kaum homoseksual yang baru didiagnosis dalam penyebaran virus HIV/AIDS di Australia mencapai 64%. Kedua adalah Bali menjadi destinasi pariwisata dengan penduduk Australia sebagai pengunjung dengan jumlah terbanyak dari tahun 2009 sampai 2014. Sehingga hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah Australia untuk merealisasikan program HCPI terhadap kaum gay dan waria di Bali untuk tetap menjaga masyarakatnya agar terlindungi dari virus HIV/AIDS. Terbukti dengan adanya program ini kaum homoseksual yang terjangkit HIV/AIDS di Australia mengalami penurunan pada tahun 2013.

6. DAFTAR PUSTAKA

Alan Rix. Japan's Foreign Aid Challenge Policy Reform and Aid Leadership (London & New York: Routledge, 1993), dalam Perwita & Yani, pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)

Annual Report AusAID tahun 2006-2007, Australian Agency For International Development dari laman: https://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/annual-reports/australian-agency-for-international-development-annual-report-2006-2007/pdf/anrep06_07section01.pdf. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2016

Australian Federation of AIDS Organisations about HIV and Stigma in Australia a Guide for Religious Leaders, 2014 dari laman: https://www.afao.org.au/library/topic/hiv-education/HIVandStigma_2014.pdf. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

Australian Government Budget 2005 – 2006 dari laman: <http://www.budget.gov.au/2005-06/> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2016

Australian Gov. (n.d) Independent Evaluation of the Australia Indonesia Partnership for HIV (AIPH) dari laman: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/hiv-ipr-man-resp-ipm.pdf> Diakses 11 Desember 2016

Australia – Indonesia Partnership for HIV: 2008 – 2015 Including the HIV Cooperation Program for Indonesia, 2007 dari laman: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/hiv-design-doc-pd.pdf> Diakses pada tanggal 12 Maret 2016

Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Pallgrave Macmillan

Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2014. Diakses dari: spiritia.or.id/Stats/StatCurr.pdf. Diakses pada tanggal 9 November 2014

Ditjen PPM & PL Depkes RI, 2009. Diakses dari: storage.jak-stik.ac.id.

- Diakses pada tanggal 9 November 2014
- Gaya Dewata: Konseling. Diakses dari <http://www.gayadewata.com/tes-hiv/konseling>.
Diakses pada tanggal 31 Juni 2015
- Global Health Observatory (GHO)*. Diakses dari: <http://www.who.int/gho/hiv/en/>.
Diakses pada tanggal 17 Februari 2015
- HIV Cooperation Program Indonesia: Overview 2016* dari laman: http://thepalladiumgroup.com/download?file=AED_1467268074_125file_upload_hcpi_overview_june2016.pdf%23HCPI+Overview%2C+June2016.pdf.
Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016
- HIV/AIDS, viral hepatitis and sexually transmissible infection in Australia Annual Surveillance Report 2013*, dari laman: <https://kirby.unsw.edu.au/sites/default/files/hiv/resources/2013AnnualSurvReport.pdf>.
Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016
- HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia 3 Annual Surveillance Report 2014 HIV supplement*, dari laman: https://kirby.unsw.edu.au/sites/default/files/hiv/resources/HIVASRsuppl2014_online.pdf. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2016
- Kedutaan Besar Australia Indonesia (2009). Script Radio - Dukungan Australia untuk Program HIV di Indonesia dari laman: <http://indonesia.embassy.gov.au/jakti/indonesian/RS090838.html>
Diakses 11 Desember 2016
- K.J. Holsti. 1995. *International Politics : Framework of Analysis*. Prentice Hall: New Jersey.
- Mandal, A (2012). Gejala Sarkoma Kaposi. News Medical Life Sciences.
- Dari laman: [http://www.news-medical.net/health/Symptoms-of-Kaposi-sarcoma-\(Indonesian\).aspx](http://www.news-medical.net/health/Symptoms-of-Kaposi-sarcoma-(Indonesian).aspx)
Diakses pada tanggal 7 Desember 2016
- Mas'ood, M. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Mengapa Kaum Homoseksual Lebih Rentan Terkena HIV/AIDS? Dari laman: <http://www.sehatmagz.com/berita-kesehatan/mengapa-kaum-homoseksual-lebih-rentan-terkena-hivaid/>.
Diakses pada tanggal 8 Oktober 2016
- Perilaku Homoseksual, Awal Mula Tersebarinya Penyakit HIV/AIDS di Dunia dari laman: <http://www.sehatmagz.com/berita-kesehatan/mengapa-kaum-homoseksual-lebih-rentan-terkena-hivaid/>.
Diakses pada tanggal 8 Oktober 2016
- Perwita, Anak Agung Bayu, dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rahayu, A. (2013). Analisa Motif politik, Ekonomi, dan Kemanusiaan Australia terhadap Indonesia Pasca Tsunami Aceh melalui Bantuan AIPRD (Australia Partnership for Reconstruction) Tahun 2005-2010
- Rasularasy, (2011) Dari Laman: arrahmah.com.
Diakses pada tanggal 17 Februari 2015
- Robert Gilpin. 1987. *The Political Economy of International Relation*. Princenton University Pres:, Princenton, New Jersey
- Shilts, R., Greider, W. (2000) *And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic*. Stonewall Inn Editions

Sogge, David. 2002. *Give and Take: What's the Matter with Foreign Aid?*
London: Zed

Statistik Kedatangan Wisatawan
<http://www.disparda.baliprov.go.id/id/Statistik2>.
Diakses pada tanggal 18 April 2015

Surat Kontrak Komisi Penanggulangan
AIDS (KPA) Prov. Bali Tahun 2009 –
2013

The GAP Report UNAIDS, 2014 diperoleh
dari:
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_Gap_report_en.pdf.
Diakses pada tanggal 9 Oktober
2016

Yayasan Spiritia (2014). PCP (Pneumonia
Pneumocystis).
Diperoleh dari:
<http://spiritia.or.id/li/bacali.php?lino=512>
Diakses pada tanggal 7 Desember
2016

Yanuarrahma, A. (2014). Peran Australia
Agency for International
Development (AUSAID) dalam
Menangani HIV/AIDS di Papua